



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 83/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG

**ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MELAKSANAKAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/ /OT.00/SK/KPN/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” perlu dilakukan upaya melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu dengan membuat Isu Internal dan Eksternal;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan dan memperlancar jalannya Sistem Manajemen Mutu dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa untuk setiap bagian harus membuat Isu Internal Eksternal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81/144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MELAKSANAKAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025
- KESATU : bahwa setiap bagian harus membuat Isu Internal Eksternal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA : Tim Audit Internal bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA : Tim Audit Internal bekerja dengan penuh tanggung jawab yang didasari atas keiklasan dengan berpedoman kepada Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI



NOMOR	URAIAN ISU INTERNAL
	ISU TEKNOLOGI
1.	Adanya Website Pengadilan Negeri Buntok (www.pn-buntok.go.id)
2.	Adanya Email PN Buntok (pn-buntok@yahoo.co.id , pnbuntok@gmail.com)
3.	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
4.	Adanya Aplikasi SLiMS Perpustakaan MARI
5.	Adanya Aplikasi Simulasi Biaya Panjar Perkara
6.	Adanya Aplikasi E-Delegasi
7.	Adanya SMS Gate away untuk Informasi dan Pengaduan
	ISU KEBIJAKAN / REGULASI
1.	Target input data perkara ke dalam aplikasi SIPP adalah 1 (satu) hari
2.	Menetapkan Sistem Pelayanan “One Day Service”
3.	Penetapan Penyesuaian Jam Kerja
4.	Penertiban Pengenaan Baju Seragam beserta tanda pengenalnya
5.	Penertiban Keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok
6.	Penetapan Jadwal Perwira Piket bagi Hakim dan Pegawai
	ISU KINERJA ORGANISASI
1.	Adanya Pemisahan Struktur Organisasi berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015
2.	Penertiban Pengelola Website untuk mengupdate perkembangan pada website PN Buntok
3.	Terdapat Kekurangan SDM pada Pengadilan Negeri Buntok sehingga banyak Pegawai yang rangkap tugas
4.	Dilaksanakan Rapat Berjenjang, mulai dari Tingkat Sub Bagian sampai Tingkat Pimpinan
5.	Penertiban pelaksanaan tupoksi agar sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja
6.	Penandatanganan Pakta Integritas
7.	Pengisian Buku Kegiatan Kerja
8.	Pengisian Buku Penilaian Kerja

9.	Penertiban Penyelesaian Penanganan Perkara yang tepat waktu.
10.	Pelaksanaan Transparansi Anggaran
	ISU SARANA PRASARANA
1.	Penertiban Pengisian Data Persediaan pada Aplikasi SAKTI
2.	Penertiban tata cara Penyimpanan SAPRAS
3.	Pembuatan SK Penanggung Jawab SAPRAS
4.	Pembuatan Jadwal Pemeliharaan SAPRAS
5.	Penertiban Pelabelan SAPRAS
6.	Penertiban pembuatan laporan yang berkaitan dengan BMN
7.	Pengelolaan penyediaan ATK dan persediaan kebutuhan perkantoran lainnya setiap bulan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran
8.	Penertiban pemeriksaan dan perubahan DIR
9.	Pengelolaan dan penyelesaian PSP
NOMOR	URAIAN ISU EKSTERNAL
1.	Pengisian Aplikasi SIKEP
2.	Pengisian Aplikasi KOMDANAS
3.	Pengisian Aplikasi SIMAN Versi 2 E-SADEWA
4.	Pengisian Aplikasi SIMARI
5.	Pengisian Aplikasi SIMPONI
6.	Pengisian Aplikasi I-Satya
7.	Pengisian Aplikasi SIRUP
8.	Pengisian Aplikasi E-FILLING
9.	Pengisian Aplikasi E-MONEV/ BAPPENAS/PP-39
10.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
11.	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016
12.	Permintaan Nama-Nama Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Yang Sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Satker Eselon I Dan Satker Upt Korwil Dipa 005.01

13.	Laporan Triwulan I TA 2023 e-Monev Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006
14.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 155-1/SEK/KU.01/07/2016. Tentang Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL.
15.	Percepatan Penyerapan Anggaran MA TA 2024
16.	Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-79
17.	Ralat Amanat Tertulis KMA RI Untuk Upacara Bendera Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI
18.	Daftar Nominatif Pengangkatan CPNS Manjadi PNS Tahun 2024
19.	Petunjuk Tentang Pengajuan Surat Usulan/Permohonan Yang Ditujukan Ke Mahkamah Agung
20.	Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Pada Aplikasi Sistim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Smart) Tahun 2024
21.	Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2025
22.	Hasil Telaah Laporan Keuangan Semester I Mahkamah Agung RI TA 2024
23.	Pemakaian Aplikasi PNBK Pada Simari Online
24.	Pengumuman Perubahan Jadwal Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua
25.	Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Pada Aplikasi Sistim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan Smart Tahun 2024
26.	Permintaan Rencana Kebutuhan BMN TA 2026
27.	Prosedur Pencatatan Pengembalian/ Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (Hlu) Yang Telah Disahkan Ke Kas Negara
28.	Monitoring Kepatuhan LHKPN
29.	Pengumuman Permintaan Rencana Kebutuhan BMN TA 2024
30.	Pengumuman Persetujuan Revisi Anggaran Pada Empat Lingkungan Peradilan
31.	Pengumuman Laporan Triwulan III Tahun 2016 E-MONEV Bappenas Berdasarkan PP NO. 39 Tahun 2006
32.	Pengumuman Pemakaian Aplikasi PNBK Pada Simari Online
33.	Pengumuman Seleksi Administrasi Lelang Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) Madya (Eselon I.A) Sekretaris Ma Dan (Jpt) Pratama (Eselon II.A) Kepala Biro Umum Ma Tahun 2016
34.	Jadwal Pelaksanaan Tes Assement Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Ma RI (Eselon I.A) Dan Pratama Kepala Biro Umum (Eselon II.A)

35.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Rkbmn) MA Tahun 2026
36.	Pengumuman Pemberitahuan Pemeriksaan Atas Kinerja Pelayanan Peradilan
37.	Pemberitahuan Penyelesaian Revisi Pagu Minus Tahun 2024
38.	Pengumuman Hasil Monitoring Evaluasi Website Pada Empat Lingkungan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI
39.	Pengumuman Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring, Dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
40.	pengumuman penyampaian lkjip tahun 2024 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025
41.	Penyusunan Laporan Tahunan 2024
42.	Petunjuk Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja
43.	Pengumuman Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS
44.	Data Centre Mahkamah Agung Tidak Aktif Untuk Sementara
45.	Pengumuman Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja
46.	Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
47.	Pengumuman pengingat laporan triwulan iv ta 2016 berdasarkan pp no. 39 tahun 2006
48.	Pemberitahuan Cuti Bersama Tahun Baru 2024
49.	Pengumuman Petikan Surat Keputusan Nomor : 47/SEK/SK.KU/1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukan KPA/KPB Pada Satker Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
50.	kelengkapan data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai SKP pada SIKEP
51.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
52.	Kelengkapan Data Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai SKP Pada SIKEP Mahkamah Agung
53.	Laporan Penilaian Prestasi Kerja
54.	Permintaan Dokumen Pemeriksaan Oleh Bpk Ri Kepada Seluruh Pengadilan
55.	Pengumuman Hari Libur Nasional
56.	Permintaan Dokumen Jaminan Pemeliharaan
57.	Pengumuman Permintaan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (Ulp)
58.	Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Xam) Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024

59.	Himbauan Untuk Para Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
60.	Pengumuman Kebijakan Strategis Anggaran Terkait Honorarium KPA, PPK, Dan PPSPM
61.	Kepada Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung Ri Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Empat Lingkungan Peradilan Untuk Memerintahkan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Nya Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi